

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAPASITAS AKTOR PERGURUAN TINGGI DI KOTA SERANG

Ahmad Sururi¹, Budi Hasanah², Mayu Ma'lumatiyah³, Annisa Dwianti⁴

¹²³⁴Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya

¹ahmadbroer@gmail.com; ²budihasanah@gmail.com;

³mayumalumatiyah05@gmail.com; ⁴dwiantidede@gmail.com

Diterima: April 2022; Disetujui: Juni 2022

Abstract. *The implementation of community empowerment has yet to provide a fully sustainable impact. In practice, it still uses the paradigm of tertiary institutions empowering the community and not universities together with the community to empower. This study aims to analyze how the implementation of community empowerment and the capacity of higher education actors are analyzed based on the stages of community empowerment, including planning, objectives, strategies, operational areas, and impact evaluation. This research method uses a qualitative approach through a case study at the University of Serang Raya. Data collection techniques using observation and interviews and data analysis using a data reduction approach, data presentation, and conclusion. The study results show that the implementation of community empowerment and the capacity of higher education actors has been running effectively. Research findings indicate that sustainable impact evaluation requires consistency in community empowerment and encourages innovative approaches to sustainable community empowerment models, monitoring and strengthening based on community participation and placing communities as crucial actors and innovative approaches to empowerment.*

Keywords: actor capacity, community empowerment, higher education.

Abstraksi. *Implementasi pemberdayaan masyarakat masih belum sepenuhnya memberikan dampak yang berkelanjutan, dan dalam prakteknya masih menggunakan paradigma perguruan tinggi memberdayakan kepada masyarakat dan bukan perguruan tinggi bersama-sama masyarakat melakukan pemberdayaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor perguruan tinggi yang dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat meliputi perencanaan, tujuan, strategi, ranah operasional dan evaluasi dampak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di Universitas Serang Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta analisis data menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor perguruan tinggi secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dampak berkelanjutan memerlukan konsistensi pemberdayaan masyarakat dan mendorong pendekatan inovasi model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, pemantauan dan penguatan berbasis partisipasi masyarakat serta menempatkan masyarakat selaku aktor kunci dan pendekatan inovatif pemberdayaan.*

Kata kunci: kapasitas aktor, pemberdayaan masyarakat, pendidikan tinggi

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor perguruan tinggi memiliki relevansi yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Pemberdayaan merupakan suatu tindakan

kolektif atau konstruksi bersama dan telah diimplementasikan oleh berbagai disiplin ilmu seperti: pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, ekonomi, studi gerakan sosial dan organisasi (Kasmel &

Andersen, 2011). Menurut (Israel et al., 1994), pemberdayaan dalam pengertian yang paling umum, mengacu pada kemampuan orang untuk mendapatkan pemahaman dan kontrol atas kekuatan pribadi, sosial, ekonomi dan politik untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi kehidupan mereka.

Inti dari proses pemberdayaan adalah suatu aktivitas atau tindakan untuk membangun potensi individu dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan efisiensi dan bagaimana suatu organisasi menggunakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut secara adil (Kasmel & Andersen, 2011). Selain menjadi konsep kunci untuk mencapai tujuan masyarakat yang berkualitas (Meredith Minkler et al., 2001), pemberdayaan masyarakat merupakan teori utama dalam komunitas psikologi (Rappaport, 1981).

Perguruan tinggi sebagai agen perubahan memiliki peran penting bagi keberlanjutan pembangunan sosial dan masyarakat (Weinberg, 2002) (Minter & Thompson, 1968) (Noseleit & Slavtchev, 2014). Di sisi lain, masyarakat memandang perguruan tinggi sebagai laboratorium Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan *problem solver*, sebaliknya perguruan tinggi memandang masyarakat sebagai arena candradimuka pembuktian Iptek dari produk yang telah dihasilkan (Compagnucci & Spigarelli, 2020; Leite & Dourado, 2013). Pandangan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh aktor perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan dampak sosial baik secara individu maupun organisasi serta meningkatkan derajat perubahan masyarakat.

Menurut Zimmerman (2000) pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tingkat yang berbeda-beda yaitu

individu, organisasi atau komunitas. Disisi lain dalam konteks proses pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengambil alih kekuasaan untuk bertindak secara efektif untuk mengubah kehidupan dan lingkungannya (M. Minkler, 1992; Rich & Stoker, 2010). Hal ini sejalan dengan pemahaman (Makara, 1994) yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mampu mendorong partisipasi masyarakat, organisasi dan masyarakat untuk meningkatkan kontrol individu, peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial.

Perspektif kapasitas dapat dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, multidimensi, dan secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh faktor kontekstual (Brown et al., 2001). Oleh sebab itu, konteks kapasitas aktor perguruan tinggi dalam aspek kelembagaan atau institusi pendidikan dapat ditinjau sebagai tugas spesifik karena berkaitan dengan faktor-faktor dalam organisasi atau sistem tertentu pada waktu tertentu (Milen, 2001). Kapasitas aktor perguruan tinggi merupakan kemampuan profesional yang dimiliki oleh individu dalam komunitas akademik dan pendidikan tinggi (Elken & Røsdal, 2017). Menurut (Thoenig & Paradeise, 2018) dimensi kapasitas aktor perguruan tinggi meliputi tata kelola sumber daya manusia berbasis akademik, ketaatan terhadap norma dan budaya sebagai komunitas akademik dan tata kelola organisasi sebagai institusi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, maka kapasitas aktor perguruan tinggi dalam mendorong keberhasilan merupakan keniscayaan dan berada pada posisi untuk memberikan penguatan terhadap dimana proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Dell'Anno & del Giudice, 2015). Praktik pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai

kegiatan perubahan yang dilakukan dari dalam diri individu, komunitas atau organisasi tetapi juga memerlukan dukungan dan dorongan dari pihak luar, terutama dukungan dari lembaga yang berperan dalam praktik pemberdayaan. Salah satu dari sekian banyak institusi yang berperan dalam pelaksanaan praktik pemberdayaan masyarakat adalah Perguruan Tinggi (Saleh & Mujahiddin, 2020).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kapasitas aktor perguruan tinggi terdapat suatu proses untuk mendorong atau menggerakkan, melakukan perubahan pada level individu, kelompok, organisasi, dan sistem sekaligus kemampuan adaptasi individu dan organisasi untuk merespons lingkungan yang berubah secara berkelanjutan (Morrison, 2001)

Dimensi kapasitas perguruan tinggi dalam konteks kelembagaan dapat dianalisis melalui pendekatan (Grindle, 1997) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu: pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan Hal tersebut jika dikaitkan dengan konteks implementasi pemberdayaan masyarakat yang efektif dapat terwujud melalui tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan, tujuan, strategi, ranah operasional dan evaluasi dampak pemberdayaan masyarakat (Laverack & Labonte, 2000).

Tahapan pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan pemberdayaan meliputi penyusunan rencana program, lokasi, tema, waktu dan kebutuhan sumber daya. Menurut (Amdam, 2010) perencanaan pemberdayaan merupakan kombinasi rasionalitas instrumental dan komunikatif dan berkontribusi pada proses pembangunan. Konteks tujuan dimaknai sebagai suatu orientasi tujuan individu dalam membentuk

motivasi kelompok dan memberikan pengetahuan para aktor perguruan tinggi (Liu et al., 2019).

Strategi pemberdayaan dilakukan melalui sinergitas dan konvergensi program dalam berbagai praktek operasional yang mampu menumbuhkan motivasi, partisipasi dan kemandirian masyarakat (Palutturi et al., 2021). Keempat tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan akan menghasilkan evaluasi dampak berkelanjutan dimana masyarakat memiliki ketahanan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Khair et al., 2020)

Dalam konteks hubungan dengan masyarakat, Perguruan Tinggi di Indonesia termasuk Universitas Serang Raya (Unsera) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengabdian masyarakat sebagaimana tercantum dalam tridharma perguruan tinggi dan ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa pengabdian masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, dijelaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Pengabdian masyarakat melalui implementasi program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi dan dilaksanakan Universitas Serang Raya dengan melibatkan tenaga pengajar/dosen beberapa diantaranya seperti program Gerakan Masjid Ramah Anak, (Gema Rama) Kampus Peduli Lingkungan Unsera, Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga dan Pemberdayaan

Sosial Lingkungan Unsera dan tata Kelola administrasi keuangan pemerintahan kelurahan di lingkungan kampus Unsera.

Berbagai implementasi program pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Raya telah menunjukkan pencapaian yang efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan seperti Program Gerakan Masjid Ramah Anak yang telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak-anak tentang literasi digital yang diselenggarakan di masjid, program kampus peduli lingkungan telah memberikan output kesadaran masyarakat terhadap lingkungan melalui sosialisasi dan informasi, program pemberdayaan ekonomi rumah tangga telah diimplementasikan melalui kegiatan inovasi dan pemasaran produk, program tata kelola administrasi keuangan pemerintahan kelurahan di lingkungan Unsera sudah mampu meningkatkan pemahaman dan praktek penyusunan kas dan administrasi pemerintahan kelurahan

Selain itu, implementasi program pemberdayaan masyarakat di Universitas Serang Raya mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (dosen) dalam memahami praktek-praktek dasar pemberdayaan masyarakat, penguatan kolaborasi dan sinergitas Universitas Serang Raya dengan masyarakat dan pengelolaan kelembagaan yang mampu mengakomodir program pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi program pemberdayaan masih belum sepenuhnya mengatasi persoalan masyarakat dan memberikan dampak yang berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh (Koehn & Uitto, 2014) bahwa dampak inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi seharusnya meliputi adanya perubahan nyata dan kebijakan kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan atau dalam perspektif yang lain belum dapat menghasilkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan (Gupta & Singhal, 2017).

Berdasarkan hasil pra penelitian, dapat diketahui meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan aspek pemanfaatan Iptek, budaya akademi, otonomi keilmuan dan kondisi sosial budaya masyarakat, akan tetapi secara konsep dan praktek masih menggunakan pendekatan bahwa perguruan tinggi memberdayakan kepada masyarakat dan bukan sesuai dengan konsep dan pemahaman bahwa perguruan tinggi bersama-sama masyarakat melakukan pemberdayaan.

Pendekatan perguruan tinggi untuk memberdayakan masyarakat dimaknai secara eksplisit yaitu kapasitas perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi secara nyata kepada masyarakat dengan beragam metode dan bidang keilmuan dan bertujuan mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat, artinya perguruan tinggi bersifat aktif atau memosisikan sebagai subjek sedangkan masyarakat bersifat pasif atau diposisikan sebagai objek.

Sedangkan pemahaman bahwa perguruan tinggi bersama-sama masyarakat melakukan pemberdayaan menekankan pada kapasitas perguruan tinggi untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama saling memberikan kontribusi secara nyata, artinya perguruan tinggi dan masyarakat dapat bertukar posisi menjadi subjek maupun objek serta melakukan kerja sama bahkan perguruan tinggi lebih menempatkan masyarakat sebagai subjek secara dominan karena masyarakat adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, mendorong penelitian tentang kapasitas perguruan tinggi dan implementasi pemberdayaan

masyarakat menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Berbagai penelitian dalam konteks internasional yang relevan dengan penelitian ini beberapa diantaranya yaitu (Hill et al., 2016) dalam hasil penelitiannya menjelaskan tentang pentingnya peran institusi perguruan tinggi dalam proses pertukaran pengetahuan dalam mendukung bisnis lokal di pedesaan, kemudian (Macpherson & Ziolkowski, 2005) memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat akan cukup efektif jika memberi focus terhadap pelayanan penyuluhan industri berbasis universitas.

Perspektif penelitian kapasitas perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh (Scull & Cuthill, 2010) menunjukkan perguruan tinggi memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki latar belakang sosial ekonomi rendah untuk memperoleh pendidikan tinggi sebagai strategi jangka panjang dan faktor keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, dan hal ini sejalan dengan penelitian (Anstadt, 2009) yang menunjukkan bagaimana komunitas masyarakat terintegrasi dengan program pemberdayaan dan diantaranya memberikan kesempatan siswa asing untuk berlatih bahasa lokal dan belajar tentang budaya lokal.

Dalam konteks lokal, penelitian yang dilakukan oleh (Suryana, 2018) menekankan pentingnya pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi, sedangkan (Rimanto et al., 2021) dalam penelitiannya menyimpulkan keterlibatan pihak Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan manusia seutuhnya dan pengembangan ekonomi masyarakat

khususnya di lingkungan pesantren, untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri dan merdeka melalui instrumen Bank Wakaf Mikro. Menurut (Anwar, 2018) sangat penting untuk menerapkan strategi kompetensi dan kerja sama dalam mewujudkan tri dharma perguruan tinggi. Selanjutnya (Soehadha, 2016) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa etos dan aktivitas pengabdian masyarakat para dosen tumbuh dan berkembang justru di luar kelembagaan yang ada di perguruan tinggi.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan akan tetapi penelitian tentang implementasi pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor perguruan tinggi masih belum dikaji secara mendalam terutama berdasarkan analisis tahapan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor perguruan tinggi berdasarkan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari perencanaan, tujuan, strategi, ranah operasional dan evaluasi dampak di Universitas Serang Raya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dikarenakan berdasarkan lokasi penelitian yang dibatasi pada kampus Universitas Serang Raya dan program-program yang diinisiasi dan diimplementasikan seperti program Gerakan Masjid Ramah Anak, (Gema Rama) Kampus Peduli Lingkungan Unsera, Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga dan Pemberdayaan Sosial Lingkungan Unsera dan tata Kelola administrasi keuangan pemerintahan kelurahan di lingkungan kampus Unsera.

Alasan pemilihan pendekatan tersebut dikarenakan penelitian ini melihat dan memahami fenomena sosial yang kompleks melalui pertanyaan penelitian (Yin, 2014). Teknik dan prosedur pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* sebagai salah satu elemen inti dari penelitian kualitatif yang tertuju pada informan yang memiliki informasi untuk dipelajari secara mendalam (Patton, 2002). Pemilihan lokasi di Universitas Serang Raya berdasarkan *typical case* (Yin, 2014) sebagai institusi pendidikan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang berasal dari tenaga pendidik Universitas Serang Raya dan unsur masyarakat. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data wawancara dan observasi (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara sebagai sumber realitas sosial dan instrument dalam menggali pengalaman, aktivitas, dan fenomena yang dialami oleh masing-masing informan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif sistematis sebagaimana dikemukakan (Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian berdasarkan perencanaan pemberdayaan masyarakat menunjukkan indikasi adanya keterlibatan aktor perguruan tinggi dalam penyusunan perencanaan melalui forum diskusi dan sosialisasi. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengatakan aspek perencanaan sudah dilakukan melalui pertemuan dan forum diskusi yang dihadiri

oleh seluruh dosen yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membahas tentang rencana pemberdayaan, lokasi pemberdayaan, tema, waktu, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Selain itu berdasarkan observasi penelitian, aspek perencanaan pemberdayaan masyarakat sudah melibatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi program seperti penetapan lokasi, nama program, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diindikasikan bahwa perencanaan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan secara efektif dengan melakukan penyusunan rencana program, lokasi, tema, waktu dan kebutuhan sumber daya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Bailey, 2010) yang mengatakan pentingnya perencanaan pemberdayaan melalui desain dan pemanfaatan metodologi sebagai dasar penilaian dan ditegaskan oleh (Laverack & Labonte, 2000) bahwa perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat menjadi langkah yang sangat penting karena terlepas dari tujuan atau sasaran program, tindakan perencanaan merupakan salah satu kegiatan penentu yang mengarah pada tujuan akhir.

Indikasi keefektifan tersebut juga ditegaskan oleh masyarakat yang secara positif menerima program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini peran penting yang dimainkan oleh target atau objek pemberdayaan masyarakat ditentukan secara sosial dan geografis dalam interaksi perguruan tinggi dan masyarakat (Moore, 2014) serta kerjasama kemitraan yang sudah terjalin dengan baik (Afshar, 2005).

Dengan demikian dapat disimpulkan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor perguruan tinggi dapat

didorong melalui kolaborasi dan integrasi peran perguruan tinggi yang sejalan dengan dinamika sosial lingkungan masyarakat sehingga diharapkan tercipta sinergisitas dan interaksi pemikiran dan tindakan kolektif yang mampu memberikan manfaat dan benefit bagi perguruan tinggi dan masyarakat.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan dalam konteks penetapan tujuan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan pada tahap penetapan perencanaan. Hal ini terkonfirmasi dari sebagian besar informan unsur perguruan tinggi yang mengatakan sudah memahami tujuan dan informasi pemberdayaan yang disosialisasikan terhadap seluruh aktor perguruan tinggi melalui forum sosialisasi program dan didukung dengan panduan program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, hal tersebut dapat diketahui dari minat dan respon yang positif serta kemampuan masyarakat dalam memahami penjelasan dan mempraktekkan program pemberdayaan yang telah diberikan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat sudah tercapai dengan baik. Indikasi ketercapaian tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut terlihat dari antusias dan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Jong & Faerman, 2021) yang mengatakan tujuan pemberdayaan mampu memberikan kontribusi terhadap implikasi dan target pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, sehingga dalam konteks penelitian ini, implementasi program pemberdayaan masyarakat telah

memberikan pengaruh positif terhadap mediasi dan hubungan antara aktor perguruan tinggi yang berada di level top dengan aktor perguruan tinggi di level pelaksana. Selanjutnya jika dikonfirmasi menurut (Bekirogullari, 2019) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat harus sejalan dengan tujuan aktor perguruan tinggi dalam upaya memberikan kontribusi bagi organisasi.

Dengan demikian berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek tujuan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan efektif dimana masyarakat sudah mampu memahami dan mempraktekkan program pemberdayaan yang telah diberikan dan disisi lain menjadi faktor penting terhadap implikasi dan target implementasi pemberdayaan masyarakat serta eksistensi aktor perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap perguruan tinggi.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para aktor perguruan tinggi di Kampus Universitas Serang Raya dalam konteks pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendekatan dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, hal ini bertujuan agar tujuan implementasi pemberdayaan dapat tercapai sesuai dengan target dan tepat sasaran. Selain itu, dampak langsung pendekatan tersebut memberikan kemudahan dalam implementasi pemberdayaan masyarakat, karena melalui dukungan dan ajakan persuasif para tokoh-tokoh tersebut maka masyarakat akan lebih mudah menerima dan memahami pentingnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

Dalam implementasinya, keterlibatan anggota masyarakat sebagai aktor utama kegiatan pemberdayaan seperti menjadi pembicara atau narasumber untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana rencana, dan mekanisme program pemberdayaan masyarakat, dengan demikian informasi tujuan program lebih mudah diterima oleh anggota masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sururi & Mulyasih, 2017) yang menekankan mendorong penguatan kapasitas warga desa baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi aktif masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal sehingga menghasilkan kader perencanaan pembangunan desa dan mentransformasikannya menjadi pelaku kebijakan pembangunan sebagai subjek perumusan kebijakan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kepada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama sekaligus menempatkan anggota masyarakat sebagai pembicara atau narasumber menunjukkan hasil yang efektif di mana masyarakat lebih mudah menerima dan mendapatkan penghargaan dari aktor pemberdayaan masyarakat perguruan tinggi. Penetapan strategi pemberdayaan masyarakat akan sangat membantu aktor perguruan tinggi untuk lebih memahami bagaimana komunitas pemberdayaan secara praktis dapat diakomodasi (Laverack & Labonte, 2000) dan terkonfirmasi melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sururi, 2015) dan (Hill et al., 2016) yang menyebutkan pentingnya peran institusi perguruan tinggi dalam proses pertukaran pengetahuan dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal di pedesaan

sebagai bagian dari dan penetapan metode pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aspek strategi pemberdayaan masyarakat sudah berjalan efektif melalui keterlibatan masyarakat dalam implementasi program pemberdayaan sehingga tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat menjadi meningkat, selain itu bagi aktor pemberdayaan perguruan tinggi, pendekatan terhadap aktor-aktor masyarakat bertujuan untuk memahami dan mengakomodasi komunitas pemberdayaan didalam masyarakat, serta menjadi strategi dan metode pemberdayaan yang paling tepat dalam meningkatkan pertukaran pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat.

Ranah Operasional Pemberdayaan Masyarakat

Ranah operasional pemberdayaan masyarakat dilakukan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, hal ini bertujuan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan dampak yang diinginkan oleh masyarakat, seperti beberapa program pemberdayaan masyarakat Gerakan Masjid Ramah Anak (Gema Rama) dikhususkan kepada masyarakat yang sebagian besar anak-anaknya memiliki akses yang rendah terhadap Pendidikan, pemberdayaan lingkungan lebih ditujukan untuk masyarakat yang memerlukan penataan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk wilayah yang memiliki akses rendah terhadap perekonomian dan sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan rendah.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rimanto et al., 2021) yang mengatakan bahwa keterlibatan pihak Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah strategis guna melakukan pembangunan manusia seutuhnya, dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengembangan ekonomi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri dan merdeka

Hasil observasi dan wawancara penelitian selanjutnya menunjukkan aspek ranah operasional pemberdayaan masyarakat menunjukkan indikasi yang efektif, dalam hal ini implementasi pemberdayaan sudah dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan dan persoalan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Prakarsa masyarakat setempat dalam mengambil keputusan dan inisiatif yang tinggi menjadi modal sosial keberhasilan pemberdayaan masyarakat (Kasmel & Andersen, 2011), dan jika dikonfirmasi menurut pendapat (Scull & Cuthill, 2010) bahwa perguruan tinggi memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki latar belakang sosial ekonomi rendah untuk memperoleh pendidikan tinggi sebagai strategi jangka panjang dan faktor keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa aspek ranah operasional pemberdayaan masyarakat sudah menekankan pada identifikasi kebutuhan dan persoalan masyarakat serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini menjadi modal sosial bagi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam waktu jangka panjang dan berkelanjutan.

Evaluasi Dampak Berkelanjutan

Pengukuran evaluasi pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui mekanisme test dan praktek terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dampak pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan melalui kemampuan masyarakat dalam menjawab test dan melakukan praktek pemberdayaan. Hasil test dan praktek sebagian anggota masyarakat menunjukkan hasil yang cukup baik, artinya masyarakat sudah mampu memahami informasi pemberdayaan dan kemampuan praktek pemberdayaan yang telah diberikan seperti kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui penataan tata kelola administrasi dan manajemen pemasaran yang efektif, menyusun administrasi kas dan pemasaran produk melalui pembuatan instagram dan blog.

Akan tetapi meskipun masyarakat mampu menunjukkan secara positif pada saat pelaksanaan evaluasi, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat masih membutuhkan pendampingan secara kontinyu dan pengawasan secara berkala, hal ini agar program pemberdayaan yang telah diberikan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa secara umum tahap evaluasi dampak pemberdayaan masyarakat sudah berjalan secara efektif akan tetapi temuan penelitian menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk dilakukan pendampingan dan bimbingan secara berkala agar dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Bailey, 2010) yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat selalu cenderung parsial dan bergantung pada kondisi dan konteks lokal. Oleh sebab itu menurut (Harrach et al., 2020), perguruan tinggi memerlukan suatu terobosan atau

pendekatan inovasi model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan untuk mengukur bagaimana dampak berkelanjutan tersebut dapat tercapai.

Inovasi model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dapat dilakukan melalui bimbingan intensif dan jadwal berkala sehingga tercipta kolaborasi dan integrasi peran perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu (Khair et al., 2020) dalam hasil penelitiannya mengatakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk melakukan pengenalan pemantauan berbasis masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya (Lyons et al., 2001) mengatakan terdapat faktor keberlanjutan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh partisipasi dan pemberdayaan dan ketiganya menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Pada tingkat pertama, partisipasi masyarakat mengarah pada inisiatif pembangunan di masa depan, sebagai hasil dari proses pemberdayaan dan pada tahap selanjutnya pemberdayaan masyarakat akan berkembang baik pada tingkat individu proyek/program, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka evaluasi dampak berkelanjutan berdasarkan hasil pengukuran tes dan evaluasi terhadap masyarakat sudah cukup efektif, akan tetapi terdapat indikasi bahwa masyarakat menginginkan agar program pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bersifat parsial, sehingga aktor perguruan tinggi memerlukan strategi inovasi pemberdayaan yang memiliki dampak berkelanjutan seperti dengan menciptakan kader pemberdayaan dari anggota masyarakat, sebagai representasi actor perguruan tinggi, pembinaan program

pemberdayaan secara berkala dan pemantauan berbasis partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor perguruan tinggi yang dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari perencanaan, tujuan, strategi, ranah operasional dan evaluasi dampak berkelanjutan secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif. Hal ini terindikasi dari hasil penelitian yang menunjukkan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor Perguruan Tinggi melalui kolaborasi dan integrasi peran perguruan tinggi yang sejalan dengan dinamika sosial lingkungan masyarakat, selanjutnya aspek tujuan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam memberikan kontribusi terhadap implikasi target pemberdayaan masyarakat dan eksistensi aktor perguruan tinggi, strategi pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan untuk mengakomodasi komunitas dan pertukaran pengetahuan, serta aspek ranah operasional pemberdayaan masyarakat sudah menekankan pada identifikasi kebutuhan dan persoalan masyarakat serta sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dampak berkelanjutan memerlukan adanya pendampingan lebih lanjut bagi masyarakat agar program yang diberikan tidak hanya dilaksanakan secara parsial dan pada waktu tertentu, akan tetapi dilakukan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, implementasi pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aktor perguruan tinggi memerlukan suatu pendekatan inovasi model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui bimbingan intensif dan jadwal berkala sehingga tercipta kolaborasi dan integrasi peran perguruan

tinggi dan masyarakat untuk mengukur pencapaian dampak berkelanjutan, melalui pengenalan pemantauan berbasis masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat serta penguatan partisipasi masyarakat.

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan berkontribusi pada pemahaman

yang lebih baik tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat baik bagi perguruan tinggi maupun masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi dan masyarakat dalam menawarkan alternatif formulasi kebijakan pemberdayaan yang mampu memberikan dampak berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afshar, A. (2005). *Community-Campus Partnerships for Economic Development: Community Perspectives* (Issue October). Federal Reserve Bank of Boston.
- Anstadt, S. P. (2009). Community Connections: An Intergenerational and Multicultural Community Group Program. *Journal of Intergenerational Relationships*, 7(4), 442–446. <https://doi.org/10.1080/15350770903288795>
- Anwar, H. (2018). Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kepedulian Sosial Mahasiswa. *Sosiohumanitas*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v20i1.45>
- Bailey, N. (2010). Understanding Community Empowerment in Urban Regeneration and Planning in England: Putting Policy and Practice in Context. *Planning Practice and Research*, 25(3), 317–332. <https://doi.org/10.1080/02697459.2010.503425>
- Bekirogullari, Z. (2019). Employees' Empowerment and Engagement in Attaining Personal and Organisational Goals. *The European Journal of Social & Behavioural Sciences*, 26(3), 389–306. <https://doi.org/10.15405/ejbsbs.264>
- Brown, L., Lafond, A., & Macintyre, K. (2001). *Measuring Capacity Building*. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Bryman., www.worldbank.org.oed/ecd%0Awww.cpc.unc.edu/measure
- Compagnucci, L., & Spigarelli, F. (2020). The Third Mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints. *Technological Forecasting and Social Change*, 161(Sepember), 120284. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120284>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixes Methods Approaches. In F. Edition (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. SAGE Publication, Inc .
- Dell'Anno, D., & del Giudice, M. (2015). Absorptive and desorptive capacity of actors within university-industry relations: does technology transfer matter? *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-015-0028-2>
- Elken, M., & Røsdal, T. (2017). Professional higher education institutions as organizational actors. *Tertiary Education and Management*, 23(4), 376–387. <https://doi.org/10.1080/13583883.2017.1371217>
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building The Public Sector of Developing Countries*. Boston MA: Harvard Institute For International Development.
- Gupta, H., & Singhal, N. (2017). Framework for Embedding Sustainability in Business

Schools: A Review. *Vision*, 21(2), 195–203.
<https://doi.org/10.1177/0972262917700993>

- Harrach, C., Geiger, S., & Schrader, U. (2020). Sustainability empowerment in the workplace: determinants and effects. *Sustainability Management Forum / NachhaltigkeitsManagementForum*, 28(3–4), 93–107. <https://doi.org/10.1007/s00550-020-00505-1>
- Hill, A., Scott, J., Moyes, D., & Smith, R. (2016). Supporting knowledge exchange in rural business—A case story from Dumfries and Galloway, Scotland. *Local Economy*, 31(7), 812–824. <https://doi.org/10.1177/0269094216669110>
- Israel, B. A., Checkoway, B., Schulz, A., & Zimmerman, M. (1994). Health Education and Community Empowerment: Conceptualizing and Measuring Perceptions of Individual, Organizational, and Community Control. *Health Education & Behavior*, 21(2), 149–170. <https://doi.org/10.1177/109019819402100203>
- Jong, J., & Faerman, S. (2021). The Role of Goal Specificity in the Relationship Between Leadership and Empowerment. *Public Personnel Management*, 50(4), 559–583. <https://doi.org/10.1177/0091026020982330>
- Kasmel, A., & Andersen, P. T. (2011). Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla (Estonia). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 8(3), 799–817. <https://doi.org/10.3390/ijerph8030799>
- Khair, N. K. M., Lee, K. E., & Mokhtar, M. (2020). Sustainable City and Community Empowerment through the Implementation of Community-Based Monitoring: A Conceptual Approach. *Sustainability (Switzerland)*, 12(22), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su12229583>
- Koehn, P. H., & Uitto, J. I. (2014). Evaluating sustainability education: Lessons from international development experience. *Higher Education*, 67(5), 621–635. <https://doi.org/10.1007/s10734-013-9669-x>
- Laverack, G., & Labonte, R. (2000). A planning framework for community empowerment goals within health promotion. *Health Policy and Planning*, 15(3), 255–262. <https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.255>
- Leite, L., & Dourado, L. (2013). Laboratory Activities, Science Education and Problem-solving Skills. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 106, 1677–1686. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.190>
- Liu, Y., Wang, S., & Yao, X. (2019). Individual Goal Orientations, Team Empowerment, and Employee Creative Performance: A Case of Cross-level Interactions. *Journal of Creative Behavior*, 53(4), 443–456. <https://doi.org/10.1002/jocb.220>
- Lyons, M., Smuts, C., & Stephens, A. (2001). Participation, Empowerment and Sustainability: (How) Do the Links Work? *Urban Studies*, 38(8), 1233–1251. <https://doi.org/10.1080/00420980125039>
- Macpherson, A., & Ziolkowski, M. (2005). The role of university-based industrial extension services in the business performance of small manufacturing firms: Case-study evidence from Western New York. *Entrepreneurship and Regional Development*, 17(6), 431–447. <https://doi.org/10.1080/08985620500385601>
- Makara, P. (1994). Policy Implications of Differential Health Status in East and West Europe. The Case of Hungary. *Social Science and Medicine*, 39(9), 1295–1302.

[https://doi.org/10.1016/0277-9536\(94\)90361-1](https://doi.org/10.1016/0277-9536(94)90361-1)

- Milen, A. (2001). *What do we know about capacity building? An overview of existing knowledge and good practice*. <https://doi.org/10.3109/10641969009073509>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. In *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Minkler, M. (1992). Community Organizing Among the Elderly Poor in the United States: A Case Study. *International Journal of Health Services*, 22(2), 303–316. <https://doi.org/10.2190/6KFL-N1WY-NPDG-RXP5>
- Minkler, Meredith, Thompson, M., Bell, J., & Rose, K. (2001). Contributions of Community Involvement to Organizational-Level Empowerment: The Federal Healthy Start Experience. *Health Education and Behavior*, 28(6), 783–807. <https://doi.org/10.1177/109019810102800609>
- Minter, J., & Thompson, I. (1968). *College and Universities as Agents of Social Change*. Center for Research and Development in Higher Education University of California, Berkeley.
- Moore, T. L. (2014). *Community–University Engagement 1*. Wiley Online Library. <https://doi.org/10.1002/aehe.20014>
- Morrison, T. (2001). *Actionable Learning: A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. Asian Development Bank Institute. <https://id.b-ok.asia/book/2556961/6871ae>
- Noseleit, F., & Slavtchev, V. (2014). Universities as Agents of Change. *Presidential Studies Quarterly*, 44(1), 95–119. <https://doi.org/10.1111/psq.12089>
- Palutturi, S., Saleh, L. M., Rachmat, M., Malek, J. A., & Nam, E. W. (2021). Principles and strategies for aises communities empowerment in creating Makassar Healthy City, Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, 35, S46–S48. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.12.013>
- Patton, M. Q. (2002). Two Decades of Developments in Qualitative Inquiry: A Personal, Experiential Perspective. *Qualitative Social Work*, 1(3), 261–283. <https://doi.org/10.1177/1473325002001003636>
- Rappaport, J. (1981). In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment Over Prevention. *American Journal of Community Psychology*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/10.1007/BF00896357>
- Rich, M. J., & Stoker, R. P. (2010). Rethinking Empowerment: Evidence from Local Empowerment Zone Programs. *Urban Affairs Review*, 45(6), 775–796. <https://doi.org/10.1177/1078087410366530>
- Rimanto, R., Hidayatullah, K., & Rudi Wijaya, M. (2021). Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Mikro Waka. *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 7(1), 19–34. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111>
- Saleh, A., & Mujahiddin, M. (2020). Challenges and Opportunities for Community Empowerment Practices in Indonesia during the Covid-19 Pandemic through Strengthening the Role of Higher Education. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1105–1113. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.946>

- Scull, S., & Cuthill, M. (2010). Engaged outreach: Using community engagement to facilitate access to higher education for people from low socio-economic backgrounds. *Higher Education Research and Development*, 29(1), 59–74. <https://doi.org/10.1080/07294360903421368>
- Soehadha, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agama; Model Pengabdian Masyarakat Oleh Dosen Dan Peran Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga. *Religi : Jurnal Studi Agama-Agama*, 12(1), 1–16.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.229>
- Sururi, A., & Mulyasih, R. (2017). Penguatan Kapasitas Masyarakat Melalui Inovasi Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v1i1.267>
- Suryana, S. (2018). Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, 2(2), 368–378. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1443>.
- Thoenig, J. C., & Paradeise, C. (2018). Higher Education Institutions as Strategic Actors. *European Review*, 26(S1), S57–S69. <https://doi.org/10.1017/S1062798717000540>
- Weinberg, A. S. (2002). The University: An agent of social change? *Qualitative Sociology*, 25(2), 263–272. <https://doi.org/10.1023/A:1015418718621>
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research : design and methods* (Fifth Edit). SAGE Publications Inc.
- Zimmerman. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and community levels of analysis. In *Handbook of Community Psychology; Rappaport, J., Seidman, E., Eds.; Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, NY, USA*, (pp. 43–63).